

**PEMBINAAN SIKAP SOSIAL SISWA MELALUI PERATURAN
SEKOLAH
(Studi Kasus di Salah Satu SMK Negeri Kabupaten Subang)**

¹Cahyono

²Dadang Mulyana

Universitas Pasundan

[¹cahyono@unpas.ac.id](mailto:cahyono@unpas.ac.id)

[²dadangmulyana@unpas.ac.id](mailto:dadangmulyana@unpas.ac.id)

ABSTRACT

The orderliness of students in one of the State Vocational Schools in Subang is so good, the regulations are not so confirmed, but students can already show good social attitudes. So the researchers are interested in finding out the school rules in fostering the social attitudes of students. The aim is to describe the school's strategy in fostering social attitudes of students. Case study research method with qualitative. Data collection techniques using observation and interview techniques. Respondents were 12 people with purposive sampling techniques and data processing techniques by data education, data display, data verification. The results showed in making school rules using the democratic system and inviting students, as well as implementing penalties and penalties for students.

Keywords: *School Regulations, Social Attitudes*

ABSTRAK

Ketertiban peserta didik di salah satu SMK Negeri di Subang begitu baik, peraturan yang ada tidak begitu tegas, namun peserta didik sudah dapat menunjukkan sikap sosial yang baik. Maka peneliti tertarik mencari tahu peran peraturan sekolah dalam membina sikap sosial peserta didik. Tujuan untuk mendeskripsikan strategi sekolah dalam membina sikap sosial siswa. Metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Responden sebanyak 12 orang dengan teknik *purposive sampling* dan teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, display data, verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan dalam membuat peraturan sekolah menggunakan sistem demokrasi dan melibatkan peserta didik, serta diterapkannya *reward* dan *punishment* kepada peserta didik.

Kata Kunci : *Peraturan Sekolah, Sikap Sosial*

A. PENDAHULUAN

Kurangnya pembinaan sikap sosial di sekolah akan membuat proses pendidikan terganggu, selain itu mengakibatkan “peserta didik cenderung untuk melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di luar sekolah” (Anggraini & Tjipto, 2015). “Terlebih lagi pendidikan saat ini menuntut peserta didik untuk mendapatkan nilai yang tinggi”. “Maka tidak heran jika peserta didik melakukan kecurangan dalam ujian, tawuran, meroko, berantem antar teman, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin dan lain sebagainya” (Anggraini & Tjipto, 2015). Terkait masalah tersebut, “berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2015 ini terjadi 339 kasus tawuran pelajar di Indonesia”. Angka tersebut meningkat di banding tahun 2013 yang hanya terjadi 225 kasusu tawuran. (KPAI: 2015).

“Berdasarkan data di atas mencerminkan bahwa perilaku peserta didik tidak lagi didasari atas etika, akhlak serta sikap yang baik, mereka melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, mereka berbuat tanpa memandang itu benar atau salah menurut agama, tata karma, adat istiadat masyarakat, mereka lebih memilih hidup bebas (tidak terikat dalam aturan) dan kontroversial” (Anggraini & Tjipto, 2015). “Persoalan moral peserta didik ini sebenarnya tidak cukup hanya dibebankan kepada guru masing-masing di sekolah atau kepada instansi sekolah, melainkan semua unsur yang ada dalam masyarakat baik itu orangtua, lembaga

keagamaan, pendidikan sosial, instansi pemerintahan dan sebagainya” (Anggraini & Tjipto, 2015).

Menurut Muhammad Nuh pasca menjabat sebagai seorang menteri pendidikan nasional menerangkan bahwa “Pendidikan karakter di nilai sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang menimpa masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah krisis moral, hal ini di karenakan pendidikan karakter bertujuan mengaplikasikan beberapa sikap positif, seperti kerja sama, nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, peduli, tanggung jawab, serta berpikir kritis dan positif”. Dengan adanya pendidikan karakter diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan semata tetapi juga memiliki budi pekerti luhur, berakhlak mulia dan memiliki sikap sosial yang tinggi

Hampir semua sekolah memiliki sebuah peraturan yang ditetapkan dan harus ditaati dan dipatuhi oleh peserta didiknya dalam membina sikap dan karakter peserta didik, begitu pula dengan SMK Negeri 1 Subang, Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama 3 bulan, dari mulai tanggal 6 Februari sampai 12 Mei 2019, penerapan tata tertib atau peraturan di sekolah sangat unik dan berbeda dengan sekolah lainnya, salah satu contohnya ada yang di namakan kotak kejujuran di mana setiap peserta didik yang mengendarai sepeda motor wajib membayar 1000 Rupiah ke kotak tersebut dan uniknya kotak tersebut sama sekali tidak dijaga atau tidak

diawasi oleh guru. Dengan adanya peraturan tersebut peserta didik diberikan pembinaan sikap kejujuran dalam melakukan segala sesuatu. Selain itu untuk membina sebuah tanggung jawab peserta didik ada sebuah peraturan di mana setiap kelas diberikan tanggung jawab untuk mengurus taman yang ada di sekitar sekolah, setiap paginya peserta didik beserta teman satu kelasnya bergotong royong untuk merawat tanaman yang ada di taman, hal tersebut secara tidak langsung mendidik dan membina peserta didik dalam hal tanggung jawab.

Berdasarkan hasil catatan buku pelanggaran peserta didik dari anggota OSIS, selama satu bulan dari tanggal 17 April sampai 15 Mei 2019 Dari berbagai pelanggaran yang dilanggar hanya ada 457 orang peserta didik yang melanggar peraturan, dan kalau dirata-ratakan hanya 24 orang peserta didik dari 1987 orang peserta didik yang tiap hari melakukan pelanggaran, di antaranya pelanggaran yang sering dilakukan peserta didik yaitu kesiangan, rambut tidak rapih, memakai aksesoris (gelang, kalung, sabuk, cat kuku), tidak menggunakan atribut lengkap seperti *name tag*, kaos kaki SMKN 1 Subang, sepatu tidak sesuai peraturan, tidak memakai ring) selain itu pelanggaran yang sering dilakukan yaitu tidak memakai seragam yang telah ditentukan, memakai jaket di sekolah dan memakai topi/ciput di sekolah, selain itu pelanggaran yang dilakukan yaitu peserta didik tidak membawa Al-Qur'an dan mengobrol saat upacara sedang berlangsung, jauh ini di SMKN 1 Subang tidak ada kasus atau

pelanggaran yang di rasa sangat besar dan berat semuanya hanya kasus ringan yang dilakukan peserta didik.

Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa peraturan sekolah di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik, dan seluruh siswa mampu mematuhi dan melaksanakannya dengan baik. Bagaimanakah sekolah tersebut membina dan mengarahkan siswanya untuk mentaati aturan sekolah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi sekolah dalam menerapkan peraturan sekolah dan strategi sekolah dalam membina sikap sosial siswa melalui peraturan sekolah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dengan sampel penelitian sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 1 orang wakasek kesiswaan, 1 orang guru BK, 1 orang pembina osis, 3 orang guru PPKn, dan 5 orang pengurus OSIS.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berbicara mengenai strategi sekolah dalam membina sikap peserta didik, setiap sekolah pasti memiliki strategi yang berbeda-beda. Sama halnya dengan SMK Negeri 1 Subang, SMK Negeri 1 Subang ini memiliki strategi di mana dalam membina sikap sosial peserta didik ini dengan adanya suatu patokan atau standar buat peserta didik dalam

bertindak dan bertingkah laku. Patokan dan standar dalam membina itu dituangkan dalam suatu larangan dan perintah yang berupa suatu aturan dan di sebut juga peraturan sekolah.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rifa'i Muhammad (2011:141) Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut: “(a) agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya, (b) agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya, (c) agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang telah di programkan oleh sekolah baik intrakulikuler maupun ekstarkulikuler”.

Berdasarkan pernyataan tersebut setiap sekolah wajib memiliki suatu peraturan untuk membina sikap peserta didik, salah satunya sikap sosial. Berdasarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan 2015 (Kemendikbud, 2015:50). Kompetensi sikap sosial yang harus dibina oleh sekolah kepada peserta didik yang terkait dalam pembentukan dan pembinaan sikap sosial peserta didik pada jenjang SMK Kurikulum 2013 terdiri dari beberapa cakupan yaitu; “(a) sikap jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan, (b) sikap disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, (c) sikap

tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME, (d) sikap toleransi yaitu, sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan dan keyakinan, (e) sikap gotong royong, yaitu berkerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas, (f) sikap santun atau sopan, yaitu sikap baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap baik atau santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain, (g) sikap percaya diri, yaitu sesuatu keyakinan kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan”.

Sekolah pasti memiliki aturan untuk membina sikap sosial peserta didik, namun tidak semua sekolah sama menerapkan aturan tersebut, begitu juga SMKN 1 Subang yang memiliki strategi berbeda dalam membuat dan menerapkan aturan tersebut, khususnya aturan untuk membina sikap sosial peserta didik. Aturan atau tata tertib di setiap sekolah itu ada, namun di setiap sekolah memiliki karakter peserta didik yang berbeda, ada peserta didik yang hanya patuh kepada peraturan saja, ada peserta didik yang cuek tidak memperdulikan peraturan dan bahkan ada juga peserta didik yang tidak

mengetahui peraturan yang ada. Ini semua terjadi karena penerapan dan strategi dalam peraturan itu sendiri, dari pernyataan tersebut Graham Sanjaya (dalam Rifa'i Muhammad, 2011:143) membagi empat bagian yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai atau kaidah tertentu, yaitu: “ *Normativist*, kepatuhan pada norma-norma hukum, *Integralist*, kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan yang rasional, *Fenomenalist*, kepatuhan berdasarkan suara hati, *Hedonist*, kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri”.

Dari keempat bagian yang menjadi dasar kepatuhan setiap individu, tingkat kepatuhan peserta didik, hampir semua peserta didik SMK Negeri 1 Subang memiliki tingkat kepatuhan yang bersifat *Normativist* di mana tingkat kepatuhan peserta didik akan suatu peraturan sekolah sudah sangat bagus, hampir semua peserta didik sudah sadar dan taat kepada peraturan dan nilai-nilai yang dibina oleh sekolah tanpa mempedulikan apakah guru melihat dan mengamati mereka atau tidak tetapi peserta didik SMKN 1 Subang tetap patuh dan sadar akan suatu peraturan sekolah.

a. Strategi pertama yang dilakukan SMKN 1 Subang yaitu melalui penyusunan peraturan sekolah.

Dalam penyusunan sebuah peraturan setiap sekolah memiliki aturan masing-masing, penyusunan sebuah peraturan itu harus memiliki pedoman supaya peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan aturan tersebut dapat berjalan dengan

baik sehingga tujuan dari peraturan dapat tercapai. Daryanto (2015:84) menyatakan bahwa ada beberapa pedoman umum dalam menyusun sebuah tata tertib sekolah antara lain sebagai berikut; “(1) Penyusunan tata tertib melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orang tua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi sekolah, (2) semua aturan disiplin dan tata tertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (siswa, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala sekolah), (3) penyusunan tata tertib harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen sekolah dan konsisten dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku, (4) tata tertib sekolah hendaknya tetap memberi ruang untuk mengembangkan kreatifitas warga sekolah dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jika perlu dibuat satu hari tertentu di mana pada hari itu siswa diberikan kepada guru, pegawai dan kepala sekolah dalam rangka pengembangan sekolah, (5) tata tertib sekolah jangan hanya di buat berupa konsep yang dipatuhi oleh warga sekolah dengan sanksi yang sangat jelas yang dapat membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan sekolah yang bisa membuat orang untuk tidak melakukan pelanggaran, (6) Tata tertib yang ada jangan sampai hanya dilakukan untuk menertibkan warga sekolah dari segi fisik saja, tetapi juga untuk membentuk mental disiplin

agar yang terjadi bukan kedisiplinan yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa tata tertib itu memiliki nilai kebenaran sehingga perlu untuk ditaati, (7) Aturan disiplin dan tata tertib beserta sanksi-sanksinya terutama diarahkan untuk membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan siswa (*self diciplin*) dan warga sekolah lainnya, di SD, sasaran seperti ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran pembiasaan pada kelas-kelas awal, (8) aturan disiplin dan tata tertib beserta sanksi-sanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreatifitas dan sikap kritis warga sekolah, (9) format penyusunan aturan disiplin dan tata tertib dapat dibuat dalam berbagai bentuk, contoh model yang dapat digunakan untuk siswa adalah model penambahan skor dan pengurangan skor, (10) tata tertib beserta sanksi-sanksinya dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala sekolah, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut, (11) selain peraturan tentang pemberian sanksi, sekolah juga dapat membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga sekolah untuk memotivasi mereka mentaati disiplin dan tata tertib sekolah”.

Pernyataan yang telah dikemukakan di atas sama halnya dengan strategi yang digunakan SMKN 1 Subang dalam melakukan penyusunan sebuah peraturan sekolah di mana peraturan sekolah dibuat oleh peserta didik itu sendiri dengan sistem demokrasi, di mana setiap peserta diwakili dua orang dari setiap

kelasnya (MPK) dengan peserta didik yang tergabung dalam OSIS melakukan musyawarah untuk membuat suatu peraturan yang di namakan musyawarah kerja siswa, setelah itu peraturan diberikan kepada pihak sekolah diantaranya kepala sekolah, pembina OSIS, bidang kesiswaan dan guru BK untuk disepakati dan disahkan sebagai suatu peraturan atau tata tertib sekolah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh NS II selaku bidang kesiswaan yang menyatakan bahwa “Dalam membuat peraturan mengenai tata tertib siswa dalam berperilaku SMKN 1 Subang menggunakan sistem demokrasi yaitu wewenang sepenuhnya dari hasil musyawarah peserta didik. 25% itu wewenang sekolah dan selebihnya 75% itu wewenang peserta didik untuk berkreaitivitas dalam membuat suatu peraturan supaya terbinanya suatu sikap peserta didik”. Selain itu aturan direvisi dan dievaluasi setiap tahunnya, bertepatan dengan sebelum lengsernya kepengurusan OSIS.

b. Strategi dalam melakukan penerapan peraturan sekolah

Penerapan dan pelaksanaan peraturan sekolah sangat tergantung pada pemahaman pihak-pihak terkait dengan peraturan yang disusun, maka dari itu sekolah harus memiliki strategi dalam penerapan peraturan. SMKN 1 Subang dalam melakukan penerapan sebuah peraturan strategi pertama yang dilakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan tersebut ke setiap kelas hal ini dilakukan oleh wakil dari MPK di setiap kelas, selain itu setiap peserta didik diberikan buku tata tertib siswa, hal ini dilakukan supaya orangtua

peserta didik tahu dan membaca buku peraturan yang ada di sekolah, dan strategi dalam melakukan penerapan peraturan sekolah yaitu dengan adanya petugas piket yang jaga gerbang setiap paginya yang dilakukan oleh anggota OSIS di bidang budi pekerti dan akhlak mulia, di mana tugas mereka yaitu mencatat dan merazia peserta didik yang melanggar peraturan. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan SMKN 1 Subang agar peserta didik sadar akan suatu peraturan sekolah sehingga terbinalah suatu sikap yang diharapkan.

Berdasarkan strategi yang digunakan oleh SMKN 1 Subang dalam melakukan penerapan sebuah peraturan sekolah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Daryanto (2015:88) dalam Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah yang menyatakan bahwa beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi tata tertib antara lain sebagai berikut; (1) “Aturan disiplin dan tata tertib yang telah disusun, disepakati dan disahkan kepala sekolah hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga sekolah, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, pegawai dan pengurus komite sekolah. Sekolah perlu memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama tentang butir-butir tata tertib yang telah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi untuk orangtua siswa dan pengurus komite sekolah dapat dilakukan dengan cara mengirimkan tata tertib yang telah dibuatkan dalam bentuk tertulis kepada mereka”. (2) “Butir-butir tata tertib sekolah dapat dibuat dalam

bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding sekolah dan lokasi-lokasi strategis di lingkungan sekolah agar dapat senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga sekolah”.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat simpulkan bahwa peraturan sekolah itu dapat berjalan dengan lancar serta tujuan dari peraturan sekolah tersebut dapat tercapat, itu tergantung dari penerapan peraturan sekolah itu sendiri karena penerapan serta pelaksanaan itu sangat penting, maka dari itu sekolah harus memiliki strategi khusus dalam melaksanakan peraturan sekolah dan semua warga sekolah harus terlibat langsung dalam melakukan pengawasan agar tujuan dari peraturan sekolah dapat tercapai.

c. Memberikan Reward (hadiah) dan Punishment (hukuman)

SMK Negeri 1 Subang dalam membina sikap sosial peserta didik menggunakan strategi reward, strategi hadiah ini digunakan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik serta untuk mendidik peserta didik supaya dapat melakukan hal terbaik, *reward* di SMKN 1 Subang ini diberikan kepada peserta didik yang sudah memberikan partisipasinya dengan cara melapor dan memberikan informasi kepada pihak sekolah ketika melihat ada peserta didik lain yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, *reward* yang diberikan sekolah yaitu berupa pujian atau bisa juga berbentuk nilai moral yang dapat membantu penambahan nilai dalam raport, *reward* disini tidak berbentuk materi.

Berdasarkan uraian di atas

peneliti dapat disimpulkan bahwa penghargaan adalah suatu hal positif yang diperoleh peserta didik karena peserta didik telah menunjukkan suatu perbuatan yang baik. Pemberian penghargaan kepada peserta didik akan meningkatkan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta membuat peserta didik termotivasi untuk menghindari diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Dengan pemberian penghargaan peserta didik akan berusaha berperilaku baik.

Selain *reward* strategi yang SMKN 1 Subang dalam membina sikap sosial peserta didik yaitu dengan cara menerapkan suatu *punishment* sebagai strategi dalam membina sikap peserta didik, membagi hukuman tersebut menjadi dua, yang pertama pelanggaran ringan, *punishment* yang diberikan sanksi peneguran dan berupa poin. Sanksi peneguran hingga dua kali, ketiga kalinya diberikan surat panggilan orangtua, skorsing hingga *droupout*. Pemberian poin ini disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, di setiap kasus itu ada jumlah poin yang didapat ketika melakukan pelanggaran dan poin tersebut dicatat dalam buku tata tertib sekolah, lalu setelah poin tersebut mencapai 100 maka anak tersebut dipanggil oleh pihak sekolah seperti kesiswaan dan guru BK untuk ditindak lanjutin dan bahkan dipanggil juga orangtuanya. Kedua adalah pelanggaran berat misalnya narkoba, tawuran, dan asusila, tindakan tersebut hukumannya langsung di *droupout*.

Dengan adanya *reward* dan *punishment*, diharapkan warga

sekolah akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah dengan baik. Pernyataan dan strategi SMKN 1 Subang tersebut sesuai dengan pendapat Eka Prihatin (dalam Wulandari 2014:48) yang menyatakan bahwa strategi yang harus dijalankan dalam menerapkan tata tertib sekolah yaitu; “(1) Berilah penghargaan kepada guru, karyawan dan siswa yang berperilaku disiplin, baik secara perseorangan atau kelompok, penghargaan dapat berupa piagam atau diumumkan dalam waktu acara tertentu atau yang lainnya, (2) tumbuhkan lingkungan yang saling menghargai sesuai dengan budaya setempat misalnya: jika memberi kritik, kritik perilakunya dan bukan orangnya, fokuskan pada kerjasama dan kompetensi yang sehat dan hindari kata-kata kasar dan hukuman fisik, (3) bangunlah rasa kepedulian dan kebersamaan di sekolah, dengan menyakinkan semua pihak bahwa sekolah milik bersama, sehingga baik dan buruknya sekolah, termasuk disiplin merupakan tanggung jawab semua pihak, (4) ikut sertakan orangtua siswa, sehingga mereka dapat mendorong anaknya untuk berperilaku baik, baik di sekolah maupun di rumah, dengan keikutsertaan ini, orangtua tidak akan kaget jika ternyata anaknya mendapat sanksi dari sekolah, (5) ikut sertakan OSIS. Seringkali siswa lebih mudah menerima jika diingatkan oleh teman sendiri, dengan melibatkan OSIS, diharapkan akan terjadi mekanisme saling mengingatkan antar siswa (6) hindarkan sekolah dari ancaman luar, agar siswa merasa aman di sekolah. Untuk itu periksa situasi lingkungan

sekolah dan temukan di mana kemungkinan terjadi gangguan, (7) Siapkan prosedur yang harus ditempuh jika ada keadaan darurat dan bila perlu keadaan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib, (8) buatlah daftar siswa yang bermasalah (peta siswa) agar mereka memperoleh pembinaan khusus, (9) lakukan evaluasi tentang pelaksanaan peraturan sekolah”.

Berdasarkan uraian di atas merupakan strategi yang digunakan oleh SMK Negeri 1 Subang dalam membina sikap sosial peserta didik melalui peranan peraturan. Karena pada dasarnya sikap sosial peserta didik itu bisa diubah dan dibina dengan cara paksaan, maka dengan peraturan sekolah tersebut peserta didik akan terpaksa mengikuti aturan yang ada, setelah peserta didik melaksanakan aturan tersebut maka lama kelamaan peserta akan terbiasa dan terbinalah sikap sosial peserta didik yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Strategi yang digunakan SMK Negeri 1 Subang dalam membina sikap sosial peserta didik melalui peraturan sekolah ada tiga strategi yang digunakan, yang pertama strategi penyusunan peraturan SMK Negeri 1 Subang menggunakan sistem demokrasi, dengan sistem 25% itu wewenang sekolah dan 75% itu wewenang peserta didik dan sepenuhnya dari hasil musyawarah peserta didik. Kedua melalui penerapan peraturan sekolah, setiap peserta didik diberikan buku tata tertib siswa dan setiap paginya dilakukan pengecekan dan raziaan di depan gerbang sekolah yang

dilakukan oleh anggota OSIS. Strategi ketiga yaitu memberikan Reward dan Punishment kepada peserta didik.

Upaya sekolah dalam membina sikap sosial peserta didik yaitu menerapkan kantin kejujuran dan kotak kejujuran, menerapkan wali pohon, membuat piket bergilir untuk setiap kelas atau ekstrakurikuler dalam bersih-bersih, menerapkan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) setiap harinya. melakukan kegiatan kebersamaan 1 jam pelajaran pertama setiap hari jum'at, serta selalu mengingatkan secara terus menerus kepada peserta didik akan pentingnya peraturan serta mengingatkan tugas dan kewajiban peserta didik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, E. N., & Tjipto, S. (2015). *Pengelolaan Tata Tertib Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Varia Pendidikan, 27, 155–151.
- Daryanto. (2015). *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015:50). *Panduan Penilaian Pada Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta : Depdiknas
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Rifa'i, Muhammad. (2011). *Sosiologi Pendidikan : Struktur Dan Interaksi Sosial Di Dalam Institut Pendidikan*. Yogyakarta : PT.Ar-Ruzz Media.

Wulandari, Febrian. (2014). *Penerapan Tata Tertib Sekolah Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Karakter Disiplin Siswa di SMK Sumpah Pemuda Joglo Jakarta Barat*. Skripsi jurusan prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. [Online]. Tersedia: <http://repository.uinjkt.ac.id> [diakses pada tanggal 23 Maret 2017]

